



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 256 /KPTS/III/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH PADA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana penatausahaan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dengan ada mutasi beberapa Kepala Bidang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, maka terhadap Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 126/KPTS/III/2011, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
19. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 57 /KPTS/ II /2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

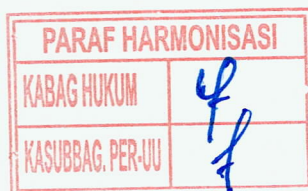
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari bayar Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 126 /KPTS/III/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Juli 2011
BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan Utama PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR :
TANGGAL :

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	- Drs. ROZALI NIP. 19580105 199006 1 001	PEMBINA (IV/a)	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	2.07.01.01.08 2.07.01.01.10 2.07.01.01.11 2.07.01.01.12	1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					2.07.01.01.17 2.07.01.01.18 2.07.01.02.09 2.07.01.02.10 2.07.01.02.22 2.07.01.02.24 2.07.01.02.28 2.07.01.02.35	5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 8. Pengadaan Mebelur 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman, Taman dan Fasilitas Parkir Gedung
	- ASLINA NIP. 19820109 200801 2 014	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF SUBBAG ADMINISTRASI UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.07.01.02.51 2.07.01.05.01 2.07.01.05.03	13. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet dan Pembuatan Home Page 14. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1	2	3	4	5	6	7
2	- Drs. H. RAJA ARLINGGA NIP. 19641231 199303 1 226	PEMBINA Tk. I (IV/b)	KEPALA BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	2.07.01.16.02 2.07.01.16.12 2.07.01.16.12 2.07.01.16.13 2.07.01.16.14 2.07.01.16.18 2.07.01.19.03 2.07.01.19.03	1. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri (Perabot) 2. Pengembangan Kluster/Sentra Industri Kecil dan Menengah (Batu Bata Press) 3. Pengembangan Kluster/Sentra Industri Kecil dan Menengah (Anyaman Pandan) 4. Penilaian dan Penghargaan Adiknya terhadap Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah 5. Penyelenggara Pelatihan Motivasi Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah 6. Pelatihan Desain Produk Industri Kecil dan Menengah 7. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (Industri Tahu/Tempe) 8. Pemberian Bantuan Peralatan dan Bahan Industri Kecil (Industri Makanan 9. Tim dan Kesekretariatan Pengembangan Kawasan Industri Buruk Baku dan Pelabuhan 10. Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Kawasan Industri Buruk Baku dan Pelabuhan
	- HERMAN JAYA NIP. 19690425 200701 1 004	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF SEKSI INDUSTRI ARGO DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.07.01.18.08 2.07.01.18.09	
3	- NAZLI, SH NIP. 19661128 199012 1 002	PENATA Tk. I (III/d)	KEPALA BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN, ELEKTRONIKA TEKSTIL DAN ANEKA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	2.07.01.16.02 2.07.01.16.08 2.07.01.16.08 2.07.01.16.08 2.07.01.17.07 2.07.01.18.07	1. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri (Mengelas dan Montir) 2. Fasilitas Pemberian Sarana dan Prasarana Bagi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Sablon) 3. Fasilitas Pemberian Sarana dan Prasarana Bagi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Bengkel dan Sepeda Motor) 4. Fasilitas Pemberian Sarana dan Prasarana Bagi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Bengkel Mobil dan Bak Truk) 5. Pelatihan Management Produksi Industri Kecil dan Menengah 6. Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha yang Telah Mendapat Bantuan dari Disperindag

1	2	3	4	5	6	7
4	- AZRINA NIP. 19660317 198903 1 002	PENATA MUDA Tk.I (III/b)	STAF SEKSI INDUSTRI LOGAM DAN MESIN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.07.01.19.03 2.07.01.19.03	7. Pemberian Bantuan Peralatan dan Bahan Industri Kecil (Industri Tenun) 8. Pemberian Bantuan Peralatan dan Bahan Industri Kecil (Industri Konveksi)
	- ALFAKHURRAZY, ST.M.Si NIP. 19710831 200003 1 002	PENATA Tk. I (III/d)	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	2.07.01.15.03 2.07.01.15.17 2.07.01.15.19 2.07.01.15.21 2.07.01.15.23	1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2. Pelaksanaan Sidang Tera dan Tera Ulang Alat UTTp 3. Penyebaran Informasi Perlindungan Konsumen dan Penyuluhan Kemetriologian 4. Fasilitasi Sertifikasi Produk 5. Pembinaan dan Monitoring terhadap Pendistribusian BBM, LPG, Sembako dan Pupuk 6. Penunjang Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 7. Pengembangan Pemasaran Antar Daerah melalui Misi Dagang 8. Pelaksanaan Pasar Murah 9. Pengembangan Outlet Promosi Produk Dagang dan Industri 10. Mengikuti Pasar Lelang Komoditi Unggulan 11. Sosialisasi Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Promosi Kab. Bengkalis
5	- YUNILAWATI NIP. 19620607 198811 2 001	PENATA MUDA Tk.I (III/b)	STAF SEKSI PENGADAAN PENYALURAN DAN PROMOSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.07.01.18.08 2.07.01.18.11 2.07.01.18.18 2.07.01.18.23 2.07.01.18.28 2.07.01.18.29 2.07.01.18.30	
	- AZURI, SE NIP. 19660317 198903 1 002	PENATA Tk. I (III/d)	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	2.07.01.16.06 2.07.01.16.08 2.07.01.17.09	1. Pengembangan Perdagangan Lintas Batas/Kelompok Kerja Sosial Ekonomi 2. Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Perdagangan Lintas Batas 3. Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha

1	2	3	4	5	6	7
	- FAUZAN AZIMA, F, SE NIP. 19840902 200903 1 002	PENATA MUDA (III/a)	STAF SEKSI FASILITASI DAN KERJASAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	2.07.01.17.17 2.07.01.17.18 2.07.01.18.20	4. Peningkatan SDM tentang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri 5. Pengembangan Ekspor Produk UKM 6. Peningkatan Fasilitas Perdagangan Lintas Batas (PLB)


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH